

SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI JANGKA MENENGAH 2005-2009

Mohamad Ikhsan

1. PENDAHULUAN

Diwarisi oleh beban krisis ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung – berupa *output loss*, selama periode, pemerintah pasca Suharto dipaksa untuk berkonsentrasi pada konsolidasi kebijakan makroekonomi – khususnya konsolidasi fiskal, reformasi dan restrukturisasi perbankan dan usaha untuk menurunkan tingkat inflasi. Usaha-usaha tersebut tergolong sukses terlihat dari pelbagai indikator makroekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi secara bertahap mengalami akselerasi dari minus 14% pada kuartal III/ 1998 secara perlahan meningkat menjadi 5% pada kuartal II/2004. Gambaran lebih impresif terlihat pada perkembangan pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto non migas yang telah mampu tumbuh di atas 5% pada kuartal II/2004. Keadaan yang sama juga terlihat pada indikator lain seperti stabilisasi tingkat inflasi di sekitar 5-7% dalam dua tahun terakhir dan begitu pula nilai tukar yang telah mendekati tingkat keseimbangan dan menurun tingkat volitilitasnya.¹

¹ Lihat Bank Indonesia, Perkembangan Moneter Sistem Pembayaran, dan Perbankan: Laporan Triwulanan Volume 4 No. 2, April-Juni 2004. Laporan ini bisa diakses melalui www.bi.go.id. Lihat juga Ishihara, Yoichiro, Indonesia: Q2 2004 GDP, laporan internal Bank Dunia Jakarta.

Walaupun tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 33% pada akhir tahun 1998 menjadi sekitar 16% pada tahun 2004, namun tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat dari keadaan sebelum krisis dan data terakhir telah stabil sejak tahun 2003. Ada beberapa penjelasan mengapa walaupun laju pertumbuhan ekonomi (khususnya non migas) membaik tetapi tidak tertranslasikan dalam peningkatan kesempatan kerja yang memadai. *Pertama*, sumber perbaikan pertumbuhan ekonomi umumnya berasal dari konsumsi masyarakat dan pemerintah bukan berasal dari peningkatan kapasitas perekonomian. Akibatnya penciptaan lapangan kerja baru cenderung minimal dan cenderung hanya mempertahankan lapangan kerja yang ada. *Kedua*, perubahan dalam pendulum demokrasi diikuti dengan perubahan dalam posisi tawar dalam peta bisnis di Indonesia. Kekuatan tawar dalam konstelasi politik pembuatan kebijakan bergeser dari pro bisnis menjadi pro buruh. Perubahan konstelasi ini membuat pasar tenaga kerja semakin *rigid* yang berakibat terjadinya peningkatan biaya tenaga kerja relatif terhadap faktor produksi lainnya. Hal ini tercermin dari peningkatan upah riil – khususnya upah minimum di sektor manufaktur secara signifikan selama periode 3 tahun terakhir. Peningkatan harga relatif tenaga kerja terhadap faktor produksi lain mendorong terjadi dampak runtutan dan tambahan lain seperti pengurangan minat investasi dalam industri padat karya, meningkatnya kegiatan *outsourcing*, dan otomatisasi.

Gejala ini terlihat dengan makin menurunnya elastisitas penyerapan tenaga kerja per 1%, peningkatan *output* dari sebelumnya sekitar 400 ribu untuk setiap 1%, laju pertumbuhan ekonomi menjadi sekitar 250 ribu per 1% laju pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, penurunan kemiskinan umumnya disebabkan oleh program bantuan sosial dan subsidi melalui subsidi beras dan lain-lain. Simulasi yang dilakukan LPEM menunjukkan bahwa pencabutan subsidi beras akan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan.

Pelajaran penting dari masa lalu menunjukkan mengembalikan pertumbuhan ekonomi menjadi agenda utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan. Tetapi pengalaman selama transisi, ternyata pertumbuhan ekonomi sendiri tidak secara otomatis menciptakan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi di masa mendatang yang dibutuhkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yang dapat menyerap tenaga kerja. Keadaan ini hanya dimungkinkan jika distorsi khususnya dalam pasar tenaga kerja yang menyebabkan peningkatan rasio upah terhadap biaya produksi lainnya meningkat. Tulisan ini akan melihat bagaimana agenda pertumbuhan ekonomi di masa mendatang sehingga tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

2. PENYEBAB MELAMBATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SELAMA PASCA KRISIS

Terdapat dua pendekatan untuk melihat penyebab terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi selama masa transisi. *Pertama*, dengan menggunakan dekomposisi sisi permintaan agregat. Dekomposisi ini memberikan sumber pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari (i) peningkatan konsumsi masyarakat; (ii) peningkatan dalam konsumsi pemerintah; (iii) peningkatan investasi dan (iv) peningkatan net ekspor. Tiga faktor pertama dikenal dengan permintaan domestik sementara sisanya merupakan permintaan eksternal. Pendekatan *kedua* dengan menggunakan dekomposisi *output* dari sisi penawaran. Dalam pendekatan pertama akan diketahui sumber pertumbuhan selama pasca krisis dibanding dengan keadaan sebelum krisis dan perbandingan dengan negara-negara di kawasan. Sementara dengan pendekatan kedua akan diketahui sumber-sumber ekspansi kapasitas perekonomian dari sisi penawaran.

Secara umum sebagai ditunjukkan dalam tabel kinerja ekonomi, Indonesia tidak terlalu buruk. Data terbaru dari BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi selama periode 2000-2003 sebesar 4,5% yang memang jauh lebih rendah dibandingkan kinerja selama periode 1990-97 yang tumbuh sebesar 8%. Kinerja yang demikian sebetulnya secara relatif juga terjadi di negara-negara lain di kawasan. Rasio laju pertumbuhan ekonomi sesudah krisis di kawasan umumnya berada di bawah 100% kecuali Filipina yang tumbuh lebih dalam periode sebelumnya. Bahkan jika laju pertumbuhan sektor non migas yang digunakan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi maka kinerja ekonomi Indonesia cenderung lebih baik dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia.²

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Rata-rata Beberapa *Emerging Countries*, 1990-2004 (%)

	Indonesia *		Korea	Malaysia	Thailand	Singapura	China	Filipina
	Total	Non Migas						
1990-1996	8,0	8,7	7,6	9,5	8,6	8,9	10,5	2,8
1997	4,7	5,2	5,0	7,3	-1,4	8,5	8,8	5,2
1998	-13,1	-14,2	-6,7	-7,4	-10,5	-0,9	7,8	-0,6
1999	0,8	1,0	10,9	6,1	4,4	6,4	7,1	3,4
2000	4,9	5,3	9,3	8,3	4,6	9,4	8,0	4,4
2001	3,8	5,1	3,1	0,4	1,9	-2,4	7,3	3,0
2002	4,3	5,0	6,3	4,2	5,2	2,2	8,0	4,4
2003	4,5	5,3	3,1	5,3	6,8	1,1	9,1	4,5
2004* *	4,8	5,6	5,4	6,5	6,6	6,9	8,7	4,8
1997-1999	-6,2	-6,6	2,1	-0,7	-3,1	2,8	7,5	1,4
2000-2004	4,5	5,3	5,4	4,9	5,0	3,4	8,2	4,2
Ratio of 2000-04/1990-96	0,56	0,60	0,72	0,52	0,58	0,39	0,78	1,51
Perubahan Absolut 1997-99/1990-96	-14,2	-15,3	-5,5	-10,2	-11,7	-6,2	-3,1	-1,4
2000-04/1997-99	10,6	11,9	3,3	5,6	8,1	0,7	0,8	2,8

* Untuk Indonesia, sebelum tahun 2001 menggunakan tahun dasar 1993 dan tahun dasar 2000 untuk selanjutnya

** Proyeksi ADB dan Penulis untuk Indonesia

Sumber: ADB, Key Economics Indicators 2004.

² Argumentasi untuk menggunakan PDB non migas sebagai ukuran didasarkan karena sektor migas dianggap sebagai *enclave* yang kurang mempunyai *multiplier* dan *linkages* yang besar dengan sektor ekonomi lainnya. Kedua, terjadi penurunan tingkat produksi migas walaupun diperkirakan hanya gejala sementara karena cadangan migas Indonesia praktis berubah dalam tahun terakhir.

Dekomposisi sisi permintaan juga menunjukkan pola yang serupa. Proses pemulihan ekonomi pasca krisis didorong oleh pertumbuhan konsumsi terutama konsumsi bukan makan. Pola pemulihan yang demikian tergolong normal disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, sebagian kenaikan konsumsi didorong oleh konsumsi yang tertunda selama periode 1998-99. Proses pemulihan ekonomi disertai dengan dampak Tobin (*Tobin effect*) - akibat peningkatan kekayaan riil (akibat peningkatan pendapatan bunga selama periode 1998-99), telah meningkatkan tingkat konsumsi dalam periode 2000-01. *Kedua*, sebagian sumber konsumsi dalam periode tersebut – dan berlangsung hingga tahun 2002 – berasal dari kenaikan upah minimum regional riil yang meningkat hingga 46% dibandingkan tahun 1997. *Ketiga*, kenaikan konsumsi juga berasal dari transfer dari pemerintah melalui subsidi yang dampaknya cenderung menurun sejalan penurunan subsidi. *Keempat*, dalam periode 2002-2003 hingga dewasa ini ekspansi kredit konsumsi yang mendorong terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat khususnya konsumsi bukan makanan.

Di hampir semua negara Asia, yang terkena krisis investasi belum sepenuhnya pulih yang sebagian merefleksi penurunan minat investasi global ke negara Asia tetapi juga merefleksikan eksekusi kapasitas terpasang. Tidak jelas apakah hal ini berlaku untuk kasus Indonesia dimana dua indikator kapasitas terpasang menunjukkan arah yang berbeda. Di Indonesia dengan rendahnya tingkat investasi, praktis tidak terjadi peningkatan kapasitas terpasang – bahkan secara efektif terjadi penurunan kapasitas terpasang akibat haus (*exhausted*) karena depresiasi.

Tabel 2
Sumber Permintaan Agregat berdasarkan Harga Konstan 2000, 2001-2004

	2001**				2002***				2003**				2004**	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
A. Permintaan Domestik	187,4%	92,5%	123,8%	-59,2%	-28,6%	40,5%	130,0%	98,3%	64,4%	25,2%	8,7%	155,9%	115,8%	120,8%
B. Permintaan Domestik (tanpa paruh sick)	133,8%	69,1%	81,0%	248,4%	65,8%	69,4%	94,7%	102,6%	61,8%	67,3%	88,5%	97,9%	112,9%	124,5%
1. Konsumsi Masyarakat	48,2%	27,7%	62,4%	226,6%	92,8%	64,5%	42,1%	41,7%	36,5%	42,8%	62,2%	75,4%	68,1%	73,5%
a. Makanan	24,6%	9,8%	15,9%	20,3%	6,5%	9,0%	10,4%	19,5%	14,0%	14,7%	16,1%	10,0%	9,8%	10,0%
b. Bukan Makanan	23,6%	18,0%	46,5%	206,3%	86,3%	55,5%	31,6%	22,2%	22,5%	28,0%	46,1%	65,5%	58,4%	63,5%
2. Konsumsi Pemerintah	7,4%	5,0%	15,7%	68,9%	15,6%	15,2%	20,9%	27,8%	7,9%	15,9%	19,4%	25,3%	16,1%	10,3%
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik	78,2%	36,3%	2,8%	-47,0%	-42,7%	-10,2%	31,8%	33,1%	17,4%	8,6%	6,9%	-2,8%	28,7%	40,7%
4. Perubahan Stok	54,3%	23,4%	42,9%	-307,6%	-94,4%	-28,9%	35,3%	-4,2%	2,6%	-42,1%	-79,8%	57,9%	2,9%	-3,6%
C. Permintaan Eksternal	-65,6%	-116,0%	-15,3%	596,5%	119,2%	60,3%	-6,1%	-42,2%	23,2%	62,4%	29,3%	35,2%	-38,2%	-27,5%
5. Ekspor	157,0%	25,7%	-59,8%	-460,4%	-64,8%	-63,5%	17,8%	35,1%	57,3%	68,3%	35,5%	54,6%	7,1%	27,8%
6. Impor	222,6%	141,7%	-44,4%	-1056,9%	-184,0%	-123,8%	23,9%	77,4%	34,1%	5,9%	6,2%	19,4%	45,3%	55,3%
7. PDB	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Catatan: ** = data sementara *** = data sangat sementara

Sumber: BPS

Yang membedakan antara pola pertumbuhan permintaan agregat adalah kinerja ekspor kecuali untuk tahun 2000, pertumbuhan ekspor Indonesia praktis stagnan. Sementara untuk negara-negara seperti Thailand dan Malaysia, ekspor justru menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor daya saing menjadi faktor utama penyebab stagnasi ekspor selama periode setelah krisis (Basri, 2004). Penyebab lain berkaitan dengan keterbatasan dalam pembiayaan ekspor akibat hancurnya sistem perbankan Indonesia tahun 1997, sehingga eksportir memanfaatkan penggunaan kredit perdagangan – yang disediakan oleh pembeli – dengan konsekuensi penurunan marjin keuntungan.

Analisis dari sisi penawaran menggunakan formula akuntansi pertumbuhan ekonomi (*growth accounting formulae*). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tergantung pada akumulasi faktor produksi dan pertumbuhan produktivitasnya. Secara matematis, persamaan pertumbuhan dapat dinyatakan sebagai:

$$y = \pm k + (1 - \pm) l + a \dots\dots\dots(1)$$

dimana y , k , l dan a secara berturut-turut menunjukkan *output*, kapital, tenaga kerja dan total produktivitas faktor.

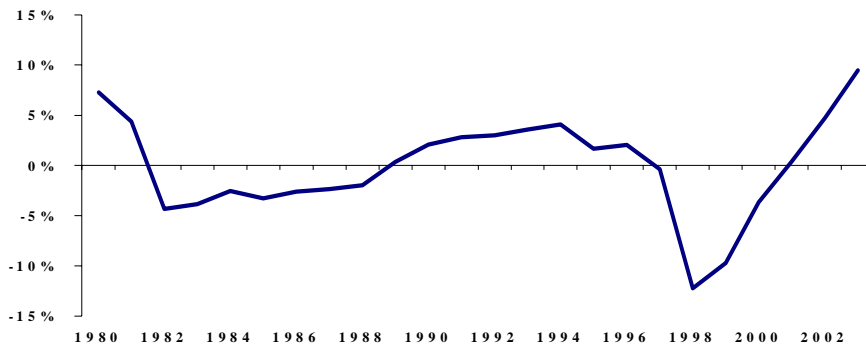
Gambaran di masa lalu menunjukkan dua tingkat sumber utama penurunan pertumbuhan kapasitas perekonomian yaitu penurunan tingkat tabungan nasional bruto dari 27% dari PDB menjadi 20% dari PDB. Penurunan PNB ini diikuti pula dengan *capital out flows (negative foreign saving)* dari positif 3% (sama dengan defisit transaksi berjalan) menjadi negatif 3% (sama dengan surplus transaksi berjalan) sehingga menyebabkan Tabungan Domestik Bruto mengalami penurunan menjadi 15% dibandingkan 30% pada periode sebelum krisis.

Sumber penurunan kedua berasal dari penurunan indeks TFP. Penurunan indeks TFP disebabkan oleh beberapa hal yaitu (i) krisis ekonomi menyulitkan atau mengurangi minat untuk meng-*up grade* teknologi, (ii) *up grading* teknologi biasanya mempunyai asosiasi dengan FDI sehingga penurunan minat FDI untuk investasi di Indonesia ikut menurunkan TFP.

3. EKONOMI INDONESIA DALAM JANGKA MENENGAH (2005-2009)

Untuk memperkirakan perekonomian Indonesia dalam jangka menengah (dan panjang) kita dapat menggunakan persamaan akuntansi pertumbuhan yang sederhana. Penggunaan sisi penawaran untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi didasarkan bahwa terdapat kemungkinan kapasitas produksi perekonomian telah terpakai sepenuhnya sehingga hanya dengan penambahan stok modal, perekonomian dapat mengalami ekspansi (lihat **Gambar 2**).

Gambar 1
Deviasi Utilisasi Kapital dari Rata-rata Utilisasi 1980-2003



Sumber: Yoichiro Ishihara and Daan Marks (2004)

Analisis potensi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah akan menggunakan persamaan akuntansi (1). Asumsikan bahwa $\pm = 0,35$ seperti yang ditunjukkan oleh Bosworth dan Collins (2003) dan total produktivitas total meningkat dengan dua skenario. Skenario pesimis tumbuh hingga TFP tahun 2010 mendekati 70% dari TFP tahun 1996. Dan skenario optimis, TFP tumbuh sehingga pada tahun 2009 TFP Indonesia secara agregat telah mendekati (95%) keadaan tahun 1996 dimana TFP Indonesia mencapai puncaknya.

Asumsi lain yang secara relatif dapat dikatakan konstan adalah pertumbuhan tenaga kerja yang diperkirakan tumbuh sebesar 1,8% per tahun.

Diasumsikan pula kualitas pendidikan tidak banyak berubah dibandingkan dengan peningkatan selama periode terakhir. Asumsi ini didasari bahwa dari pelbagai survei menunjukkan bahwa – walaupun terdapat *anecdotal evidence* tentang kekhawatiran bahwa desentralisasi menyebabkan kualitas pendidikan mengalami penurunan – kuantitas dan kualitas pendidikan cenderung bertahan dan sedikit mengalami perbaikan dibandingkan keadaan sebelum krisis ekonomi. Diperkirakan perbaikan tingkat pendidikan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Tetapi *up grading* melalui kegiatan non pendidikan dapat memberikan dampak dalam waktu yang lebih pendek terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan menggunakan asumsi di atas, pertumbuhan ekonomi akan bersumber dari dua sumber utama yaitu akumulasi modal (investasi) dan peningkatan produktivitas. Investasi akan berasal dari peningkatan investasi pemerintah (baik pemerintah pusat dan daerah), investasi swasta domestik dan asing dimana sebagian besar dari kebutuhan investasi sebesar 92% dari PDB akan berasal dari sektor swasta.

Dilihat dari komposisinya, sebagian besar dari investasi swasta akan berasal dari investasi domestik sementara investasi asing baru akan meningkat setelah tahun 2006. Hal ini dapat berlangsung jika iklim usaha telah membuahkan hasilnya dari proses reformasi yang dilakukan oleh program pemulihan ekonomi 1997-2004 termasuk implementasi Inpres No. 5 Tahun 2004 yang dikenal dengan *White Paper*. Sebagian dari investasi asing akan terjadi pada kegiatan ekonomi ekstraktif seperti sektor migas yang diperkirakan akan mengalami peningkatan produksi mulai tahun 2004/05 mendatang.³

Sementara investasi pemerintah belum banyak berubah hingga tahun 2006 sehubungan kelanjutan program konsolidasi fiskal pemerintah. Baru setelah tahun 2007, diharapkan terdapat *fiscal space* yang memungkinkan ekspansi fiskal untuk dilakukan. Sesuai dengan semangat desentralisasi, sebagian besar dari program investasi pemerintah akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dilihat dari komposisi investasi pemerintah, sebagian besar dari investasi ini akan diarahkan kepada investasi sosial (memenuhi amanat UU Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan alokasi untuk pendidikan minimum 20% dari total APBN dan APBD) yang dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan terjadi dalam jangka panjang. Oleh karena itu sebagian besar kebutuhan pembiayaan infrastruktur – baik untuk menjaga dan mengembalikan stok kapital sosial seperti keadaan sebelum krisis ekonomi 1997 dan meningkatkan kuantitas dan kualitas untuk memperbaiki iklim investasi – harus dibiayai bersama-sama dengan sektor swasta. Mekanisme *partnership* antara sektor swasta dan pemerintah perlu diintensifkan terutama di daerah atau kegiatan-kegiatan yang telah memenuhi tingkat komersial. Sementara untuk daerah non komersial, peran pemerintah menjadi lebih intensif dan mengingat peran pemerintah daerah yang makin menguat serta sistem penerimaan negara yang masih sepenuhnya dalam kendali pemerintah pusat, sistem insentif yang positif perlu dikembangkan untuk mendorong *partnership* antara pemerintah pusat dan daerah. Tiga kandidat sistem insentif dapat dikembangkan adalah (i) memperbaiki sistem alokasi umum dimana *conditionality* terhadap alokasi dan *disbursement* dana DAU dikaitkan kinerja pemerintah daerah memperbaiki iklim usaha; (ii) penggunaan Dana Alokasi Khusus yang terkait dengan kinerja dalam memperbaiki – misalnya kemiskinan atau iklim usaha – dimana daerah yang mampu memenuhi atau melebihi target akan mendapatkan *matching grant* dari pemerintah pusat; (iii) saluran ketiga adalah melalui mekanisme pinjaman daerah dengan syarat infrastruktur pasar pinjaman daerah telah dipersiapkan termasuk rating daerah.

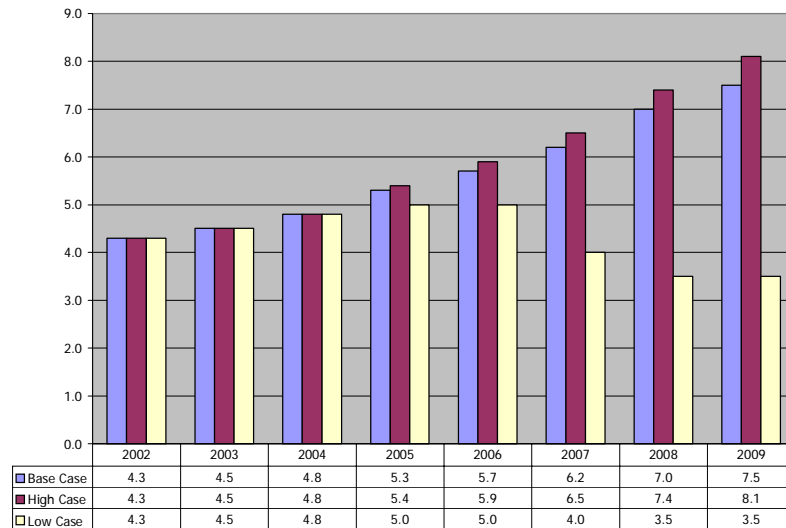
³ Presentasi Menteri ESDM dalam temu *stakeholders*, Juni 2004

Peningkatan produktivitas hanya dimungkinkan melalui empat pilar penting yang bekerja secara simultan. *Pertama*, peningkatan investasi asing biasanya disertai dengan perbaikan teknologi termasuk dalam cara pengelolaan perusahaan dan marketing. *Kedua*, restrukturisasi dalam perusahaan domestik mulai dari sumber pembiayaan yang makin seimbang dengan kebutuhan investasi – dengan mendorong pasar modal, perbaikan dalam praktek penyaluran kredit yang mengikuti kaidah perbankan yang prudensial dan perbaikan tatakelola perusahaan domestik serta upaya untuk mendorong penerapan teknologi tepat guna. Dalam hal ini peran pemerintah lebih merupakan fungsi fasilitator dengan misalnya menciptakan lembaga pemeringkat atau sistem informasi kredit atau berbagai fasilitas fiskal untuk mendorong daya tarik pasar modal. *Ketiga*, upaya melanjutkan restrukturisasi BUMN baik dengan mendorong tekanan kompetisi bagi BUMN maupun dengan melakukan privatisasi. *Keempat*, perbaikan sumber daya manusia merupakan titik sentral dalam mendorong peningkatan produktivitas secara berkelanjutan. Peran Pemerintah relatif menonjol dalam pilar ini mulai dari pengalokasian anggaran untuk pendidikan dan kesehatan yang lebih meningkat hingga tingkat standar negara Asia Timur. Alokasi anggaran yang digunakan adalah sekitar 7-8% dari PDB dan 4% dari PDB dewasa ini, digunakan untuk perbaikan standar pendidikan, perbaikan iklim usaha dalam kegiatan bisnis pendidikan dan pelatihan, reformasi secara total balai latihan kerja. Sementara itu insentif khusus dalam bentuk *tax deductible* digunakan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk meningkatkan produktivitas partner kerjanya terutama untuk UKM. Keempat pilar ini hanya bisa dimungkinkan jika perbaikan institusi dapat secara bertahap diperbaiki (lihat **Kotak 2**)

Perbedaan dalam pencapaian perbaikan dalam reformasi mikroekonomi dalam mendorong investasi baru dan perbaikan produktivitas menghasilkan skenario pertumbuhan yang berbeda (skenario basis (6,3%) *vs* skenario tinggi (6,7%).

Jika pemerintah SBY-JK gagal melakukan reformasi dalam mikroekonomi, sangat boleh jadi laju pertumbuhan ekonomi kembali pada tingkat sekitar 3-4 persen seperti yang dialami oleh pemerintah Abdurahman Wahid.

Gambar 2
Indonesia : Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2002-2009

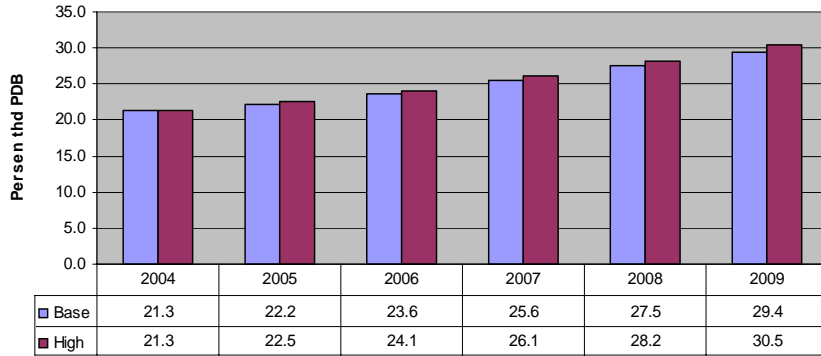


Tabel 3
Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Penawaran, 1960 - 2009

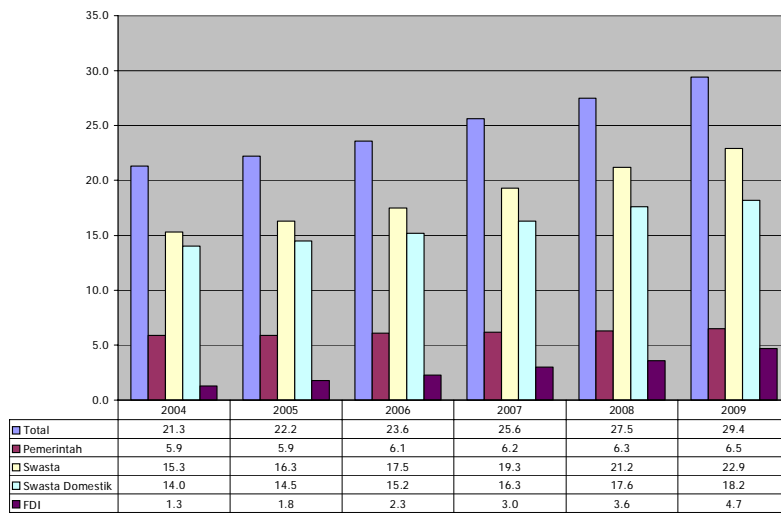
Period	Output	Output per Worker	Contribution of:		
			Physical Capital	Education	Factor Productivity
1960-1970	4,10	2,07	0,18	0,58	1,29
1970-1980	7,87	4,97	2,75	0,35	1,80
1980-1990	6,38	3,34	2,48	0,56	0,27
1990-2000	4,21	1,50	1,95	0,47	-0,90
1960-2000	5,63	2,96	1,84	0,49	0,61
1990-1997	7,38	4,54	2,51	0,47	1,50
1997-2000	-2,82	-5,25	0,67	0,45	-6,30
2000-2003	3,73	1,15	0,38	0,41	0,36
2003-2004	4,55	1,95	0,28	0,44	1,23
2004-2009	6,29	3,74	1,13	0,52	2,09

Sumber : Untuk periode 1960-2000 dari Bosworth and Collins (2003) dan periode 2000-2003 perhitungan penulis

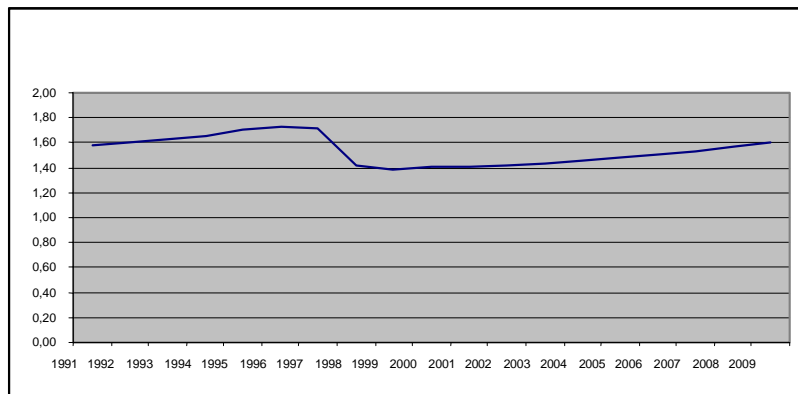
Gambar 3
Rasio Investasi terhadap PDB, 2004-2009



Gambar 4
Kebutuhan Investasi (Rasio Investasi terhadap PDRB)



Gambar 5
Indeks TFP, 1990-2008



4. KESIMPULAN: BEBERAPA AGENDA REFORMASI MIKROEKONOMI UNTUK MENGEMBALIKAN PERTUMBUHAN EKONOMI.

Tantangan untuk mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi ke "potential path" seperti yang terjadi dalam era 1980-an tidak mudah, mengingat beberapa hal. *Pertama*, transisi politik menuju ke demokrasi masih belum berjalan seperti yang diinginkan dan membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil. Akibatnya terdapat biaya transisi yang harus ditanggung bersama. Kesiapan menanggung biaya transisi dihambat oleh perasaan ketidakadilan dalam masyarakat khususnya kelompok menengah. *Kedua*, kesadaran masyarakat tentang arti demokrasi belum sepenuhnya berjalan, terbukti dari tipisnya kelompok pembayar pajak (apalagi pembayar pajak yang patuh dan benar) dan tingginya tingkat ketergantungan terhadap subsidi. Rezim otokrasi di bawah Presiden Soeharto dapat melakukan pembangunan tanpa membebankan rakyat – malah menghamburkan subsidi – tetapi dapat membebarkannya kepada "alam" dan utang. Rezeki minyak dan gas dan utang luar negeri telah menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Memori terhadap "hidup enak" ini menyulitkan pemerintah dalam masa transisi dan mengalami keterbatasan sumber daya dan akses terhadap sumber eksternal untuk melakukan penyesuaian yang tidak populer tetapi perlu. Keadaan sekarang dipersulit dengan kenyataan kita menghadapi kekosongan dalam kepemimpinan. *Ketiga*, globalisasi dan revolusi teknologi informasi menyebabkan suasana lingkungan ekonomi dunia berbeda jauh dibandingkan pada saat Jepang – atau bahkan Korea - membangun industrinya. Perubahan yang begitu cepat menyebabkan kita tidak bisa lagi menunggu dan membuang-buang waktu. Jumlah pesaing pun makin banyak dan beragam. Analisis daya saing yang dilakukan oleh McKinsey dan LPEM menunjukkan bahwa posisi daya saing Indonesia hingga kini masih lumayan dan tergolong maju di antara negara ASEAN. Tetapi seandainya saja kita bisa mempertahankan posisi daya saing kita seperti di masa lalu, kita tetap akan kalah karena negara-negara lain jauh lebih progresif dibandingkan kita. Yang mengkuatirkan justru kecenderungan adanya gerakan yang membalikkan tren yang ada sekarang menuju rezim yang proteksionis.

Menghadapi tantangan di atas, agenda pertama yang menjadi prasyarat adalah kepemimpinan yang progresif yang memiliki visi ke depan dan jangka panjang. Keberanian untuk melakukan reformasi untuk menciptakan kapasitas perekonomian untuk bersaing sangat kita butuhkan. Kita tidak bisa lagi minta waktu untuk mempersiapkan diri karena negara lain sudah bergerak dengan cepat dan siap untuk bertarung. *Gradual approach* mungkin masih bisa diterima tetapi *speed of adjustment* harus dipercepat. Karena banyak hal yang bersifat kelembagaan yang mesti disiapkan, presiden mendatang belum bisa menjanjikan hasil minimal dalam dua atau tiga tahun. Baru pada tahun ketiga – jika ia beruntung – dapat menuai hasil.

Reformasi dalam makroekonomi telah menuai hasil dan praktis tidak mendapatkan tantangan yang berarti karena biasanya dalam kelompok ini tergolong sebagai kelompok *win-win policies*.

Memasuki agenda reformasi mikroekonomi, tantangannya akan lebih berat mengingat persoalan asimetri dalam distribusi biaya dan manfaat dari reformasi – manfaat reformasi per kapita yang rendah (karena tersebar di seluruh populasi) sementara biaya per kapita yang tinggi dialami oleh kelompok kepentingan - dan munculnya persoalan *time inconsistency* – dimana biaya reformasi biasanya muncul seketika sementara manfaat biasanya muncul kemudian. *Trade off* ini akan selalu muncul dan suatu kebijakan yang telah dieksekusi dan tujuannya sementara menjadi sukar dicabut kembali.⁴

Contoh lain dari kebijakan yang memiliki *trade off* dan memerlukan *political skill* untuk mengeksekusikannya adalah penyelesaian masalah perburuhan. Dimulai dengan kebijakan upah minimum yang makin tidak bisa diprediksi. UMR tahun 2002 di beberapa daerah tidak disusun berdasarkan peraturan yang berlaku. Di Jakarta misalnya UMR ditetapkan berdasarkan rata-rata pendapatan per kapita bukan kebutuhan hidup minimum seperti yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Penetapan UMR yang demikian menyebabkan prediktibilitas kebijakan menjadi kabur. Padahal prediktibilitas menjadi unsur penting dalam investasi karena memungkinkan pengusaha untuk menghitung biaya per unit dengan pasti. Di samping masalah UMR, kebijakan perburuhan yang tidak kondusif dan jelas menyebabkan biaya untuk mempekerjakan buruh (*hiring cost*) menjadi relatif mahal. Betapa tidak walaupun pengusaha secara relatif bebas dalam merekrut karyawan (*free entry*) tetapi menjadi relatif tidak bebas dalam mem-PHK-kan karyawannya walaupun karyawannya tidak berprestasi atau melakukan tindakan kriminal. Akibatnya secara implisit biaya perekrutan tenaga kerja menjadi mahal (walaupun upahnya relatif tidak mahal). Proteksi yang berlebihan terhadap buruh akan menyebabkan rigiditas dalam pasar tenaga kerja dan akan menyulitkan proses penyesuaian dalam perekonomian dapat terjadi. Di negara-negara Amerika Latin, proteksi dan rigiditas pasar tenaga kerjanya tinggi, sedangkan di negara Asia Timur, pasar tenaga kerjanya relatif tidak terproteksi (dan relatif tidak *rigid*). Pengalaman di negara-negara Amerika Latin yang kerap terkena goncangan serta kurang berkembang dan pengalaman negara di Asia Timur ini seharusnya menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam membuat pasar tenaga kerja yang sehat. Dalam hal ini menjadi sangat penting bagi aktivis serikat buruh bersama-sama pemerintah dan asosiasi pengusaha untuk meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Perlindungan terhadap buruh dapat dilakukan dengan memperkuat *law enforcement* dengan menghukum secara tegas para pengusaha yang melanggar konvensi internasional dalam perlindungan terhadap buruh tanpa harus menambah aturan-aturan baru.

⁴ Lihat kasus larangan impor beras dan gula.

Reformasi regulasi mempunyai dimensi politik lain karena menyangkut kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Tambahan regulasi baru dilakukan Pemda untuk mengisi kebutuhan pembiayaan daerah yang telah didesentralisasikan. Tetapi karena pelaksanaannya tidak melalui analisis yang memadai regulasi yang berlangsung selama ini justru kontraproduktif. Adalah menjadi sangat penting bagi pemerintah (pusat dan daerah) untuk melakukan penyederhanaan peraturan dan melakukan rasionalisasi pajak atau pungutan. Akan menjadi sangat mahal jika pemerintah (terutama pemerintah daerah) baru menyadari dampak kebijakan pajak atau retribusi yang memberatkan setelah proses realokasi usaha ke daerah atau negara terjadi. Deregulasi ini memerlukan perubahan dalam hubungan keuangan pusat daerah yang memberikan *taxing power* tanpa menambah pungutan baru bagi masyarakat. Salah satu kandidatnya adalah mentransfer Pajak Bumi Bangunan menjadi Pajak Daerah.

Tetapi ada beberapa agenda mikroekonomi yang relatif *trade-off*-nya rendah. Misalnya upaya untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Langkah ini dapat dilakukan dengan merevitalisasikan dan memberikan otonomi (bagi) Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Bukan rahasia lagi BLK milik pemerintah dewasa ini praktis sepi dari peminat karena kurang respon terhadap permintaan pasar. Revitalisasi BLK ini dapat dilakukan dengan menggunakan sebagian dari keuntungan PT Jamsostek dan dana pungutan atas tenaga ekspatriat yang tidak jelas alokasinya.

Kebijakan lain adalah dengan melakukan diplomasi dengan pemerintah Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Taiwan serta Hongkong untuk mempermudah proses perekrutan terhadap TKI Indonesia. Penyederhanaan izin disertai dengan reformasi dalam Depnaker (dan Ditjen Imigrasi) akan menurunkan biaya bagi TKI untuk bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan hal ini menjadi penting pula perubahan tingkah laku TKI dalam menghadapi peraturan lokal. Perubahan peraturan terhadap tenaga kerja di Malaysia sebagai didorong oleh tingkah TKI yang membuat pemerintah Malaysia pusing dan memperketat aturan. Wawancara di televisi menunjukkan banyak TKI ilegal sebetulnya secara sadar mengilegalkan diri karena ingin mengakali peraturan lokal yang berlaku untuk kepentingan pribadi dan jangka pendek. Seperti dalam banyak hal lain intropeksi berlaku untuk kita semua bukan sekedar menyalahkan pemerintah saja.

Langkah reformasi dalam sistem hukum juga tergolong memiliki *political acceptance* yang tinggi dan merupakan fondasi bagi tercipta mekanisme atau sistem baik untuk menciptakan aturan main baru atau melaksanakan aturan main lama dan sekaligus menciptakan suatu penyelesaian konflik. Bagi pelaku bisnis hal ini akan menciptakan ketidakpastian dan mengurangi *cost of doing business* jika mekanismenya diciptakan dengan tepat.

Reformasi dalam sistem birokrasi juga akan memperlancar usaha memerangi korupsi yang bukan hanya menciptakan biaya ekonomi tinggi tetapi juga mengurangi kapasitas negara untuk menjalankan fungsinya sebagai regulator dan fasilitator. Pemberantasan korupsi merupakan tema kampanye yang paling baik dan paling laku untuk dilakukan. Jika hal ini dilakukan oleh pemerintah Megawati merupakan langkah yang positif dan merupakan nilai plus di tengah keraguan masyarakat terhadap janji pemimpin baru untuk memerangi korupsi. Langkah pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara meminta para pemimpin baik yang sedang memerintah maupun yang akan memerintah melakukan pembuktian tentang bagaimana hartanya diperoleh.

Agenda yang sebetulnya tidak mempunyai *trade-off* jika dikemas dengan baik adalah pembangunan infrastruktur. Beberapa jenis infrastruktur yang penyesuaian harganya telah mendekati biaya ekonomi dapat dipercepat proses pembangunannya dengan cara mempercepat pembuatan aturan main yang operasional dalam bentuk PP atau Kepres atau Kepmen serta menghilangkan tumpang tindih dari aturan main tersebut. Langkah berikutnya adalah dengan cara memperkenalkan sistem penentuan harga yang lebih fleksibel dan mengurangi kandungan politik dalam penentuannya. Misalnya, tarif listrik atau tol tidak perlu di Keppres-kan atau keputusan DPRD tetapi cukup diputuskan oleh suatu Komite Independen atau paling tinggi hanya Kepmen saja. Pembangunan infrastruktur pun akan banyak tertolong dengan reformasi dalam sistem peradilan dan hukum terutama berkaitan dengan masalah pembebasan tanah yang makin sulit sebagian akibat tumpang tindih pemilikan.

Agenda terakhir adalah jika privatisasi secara politis sukar dilakukan maka untuk memacu perbaikan efisiensi adalah dengan membuka pasar dan mengurangi tingkat proteksi kepada pelaku lama. Penciptaan pasar akan mendorong para monopolis untuk memperbaiki diri jika tidak ingin dikalahkan. Sudah banyak contoh dari langkah positif pembukaan pasar. Contoh dalam industri penerbangan dan TV. Garuda Indonesia masih menikmati pangsa pasar yang cukup besar karena berhasil melakukan perubahan. Dulu saat monopoli, tidak ada permintaan maaf dari awak Garuda kalau terlambat, tetapi sekarang mereka terpaksa mengirim pesawat kosong dari Jakarta untuk menjemput penumpang dari Batam karena mereka takut pasarnya diserobot oleh maskapai lain. Contoh serupa dalam kasus TV. TVRI kembang kempis karena penyesuaiannya sangat terlambat dan akibatnya pangsa pasar mereka terlanjur diambil oleh TV swasta. Jika proses pembukaan pasar ini dapat dilanjutkan pada industri-industri lain seperti listrik, telekomunikasi dan lain-lain termasuk industri besi baja yang masih diproteksi sangat tinggi niscaya manfaatnya akan segera terasa. Ambil contoh dalam industri telekomunikasi. Munculnya teknologi CDMA menimbulkan inovasi berupa *fixed wireless phone* yang merupakan jenis alat telekomunikasi di tengah-tengah antara *mobile* dan *fixed line phone*.

Konsumen diuntungkan bukan hanya makin banyak variasi dan pelaku tetapi juga menyebabkan harga percakapan untuk *mobile phone* juga akan tertekan. Proses penyesuaian ini tidak akan memakan waktu yang terlalu lama. Lihat saja bagaimana kompetisi di antara *fixed wireless phone* antara Telkom Flexi, Esia dan *Mobile 8* yang muncul dalam waktu kurang dari 6 bulan.

Langkah-langkah di atas jika diikuti dengan kebijakan publik yang tepat dalam mendorong peningkatan peran UKM, niscaya bukan hanya akan mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi sekitar 7-8% pada akhir tahun 2008-9 hingga dekade mendatang, tetapi juga akan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi seperti yang diuraikan dalam **Kotak 1** dan **Kotak 2**.

Penempatan fungsi pemerintah yang tepat yang tidak menempatkan pada posisi “market mania” atau “market phobia”. Langkah liberalisasi yang dikemukakan di atas hanya akan efektif jika diikuti oleh sistem regulasi yang efektif dimana peran pemerintah menjadi fungsi sentral yang mendorong bekerjanya mekanisme pasar (*market complementary not market excluding*)

Kotak 1:

Lima “stylized facts” dari Pertumbuhan Ekonomi

Studi Klasik yang dilakukan oleh Easterly dan Levine menunjukkan ada lima fakta empirik tentang pertumbuhan ekonomi yaitu *pertama*, perbedaan peningkatan pertumbuhan ekonomi per kapita di antara negara di dunia bukan disebabkan oleh akumulasi faktor produksi tetapi lebih disebabkan oleh faktor lain yaitu *Total Factor Productivity* (TFP). Pendapat ini sejalan dengan Krugman (1997) yang melihat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bukan berasal dari akumulasi modal (menabung) melainkan berasal peningkatan produktivitas melalui inovasi secara terus menerus.

Kedua, telah terjadi divergensi yang makin besar dari PDB per kapita dan bukan konvergensi atau konvergensi yang kondisional seperti yang diprediksi oleh teori pertumbuhan ekonomi. Hingga dewasa ini belum diketahui penyebab terjadi divergensi karena argumen yang dikembangkan belum meyakinkan dan seringkali tidak konsisten satu sama lain. Dengan makin tersedianya data diharapkan dalam waktu yang tidak lama akan diketahui penyebab terjadi divergensi ini.

Ketiga, fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berlangsung secara terus menerus. Siklus pertumbuhan terjadi dari waktu ke waktu. Dilihat antara negara pola

pertumbuhan ekonomi pun berbeda. Sebagian negara mampu lepas landas sementara banyak negara gagal mengalami pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan tumbuh berfluktuasi maka hal ini tidak terjadi dengan perkembangan akumulasi modal yang cenderung lebih stabil.

Keempat, studi ini menunjukkan bahwa arus faktor produksi bergerak ke beberapa tempat yang terkonsentrasi membuktikan eksternalitas yang mengarah pada aglomerasi kegiatan ekonomi terjadi. Hal ini memberikan bukti pula kebijakan industrial yang mendorong terjadinya aglomerasi akan mendorong terjadinya sumber pertumbuhan ekonomi.

Kelima, peranan kebijakan ekonomi penting terutama dalam mendorong terciptanya lingkungan ekonomi yang bukan hanya memberikan insentif terjadinya akumulasi modal tetapi juga untuk mendorong proses inovasi.

Kotak 2:

Elemen yang Dibutuhkan untuk Mendorong Terciptanya Kewiraswastaan dan *High Quality Growth*

Pertanyaan yang bisa kita ajukan elemen institusi apa yang kita butuhkan untuk menjamin proses pertumbuhan yang berkualitas? Dani Rodrik (2000) berargumen terdapat enam elemen yang dibutuhkan sebagai *market supporting institution* yaitu: Hak cipta (*property rights*); regulator dan kerangka regulasi; institusi untuk stabilisasi makro ekonomi; institusi untuk asuransi sosial dan institusi untuk manajemen konflik. Sangat besar kemungkinan jika beberapa institusi di atas tidak “fit” satu sama lain. Dinamika permasalahan dan kemungkinan di atas membuat institusi menjadi dinamis pula. Institusi juga harus berubah sesuai perubahan dalam nilai-nilai dalam masyarakat.

Property Right

Seperti yang dikemukakan oleh North dan Thomas (1973) dan North dan Weigast (1989), kepastian *property right* stabil merupakan elemen yang penting dalam sejarah pertumbuhan ekonomi dunia. Tanpa jaminan terhadap hak cipta, tidak ada satupun *entrepreneur* yang mau mengambil resiko dalam melakukan inovasi, padahal inovasi merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan teknologi kualitas *human capital* dan efisiensi penggunaan modal. Ekonom institusional seperti

North – pemenang Nobel Ekonomi tahun 1994 – menekankan tentang “control” dari pihak *ownership*. Hal ini berarti penguasaan tentang hak cipta pun sebetulnya bukanlah hak yang mutlak dan mempunyai insentif bagi entrepreneur untuk secara kontinyu melakukan proses inovasi.

Regulatory Institution

Mekanisme pasar sempurna hanya ada didalam buku teks. Pelbagai asumsi dalam mekanisme pasar banyak tidak terpenuhi seperti dalam kasus sektor finansial. Jadi kita akan selalu berada dalam “second best situation”. Karena potensi kegagalan pasar sangat besar, ekonom kemudian ke luar dengan ide pembentukan institusi yaitu undang-undang yang mengatur aturan main dan pembentukan lembaga pengawas sebagai eksekutor. Hasilnya negara yang sangat bebas dalam kompetisi seperti Amerika Serikat justru mempunyai sistem regulasi yang sangat intensif. Sama halnya di sektor finansial dimana stereotip kapitalisme sangat menonjol justru merupakan kegiatan ekonomi yang paling intensif tingkat regulasinya. Mesti diingat pula terutama untuk negara berkembang, institusi regulasi yang dibutuhkan juga harus mampu mengatasi *coordination failures* dan *capital market imperfection*. Dalam hal ini, pengembangan kerjasama pemerintah dan sektor swasta seperti yang dilakukan oleh MITI merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar. Catatan sejarah yang harus diangkat adalah bagaimana membuat mekanisme *picking the winners* dan *exit policy* terdisain dengan baik dan berjalan secara transparan. Yang terakhir menjadi sangat penting berkaitan dengan munculnya masalah *too big to fail* yang seringkali harus menelan biaya pemerintah untuk penyelamatkannya.

Institusi Kestabilan Makroekonomi

Inovasi di sisi yang paling ekstrim dan bahkan kegiatan investasi atau kegiatan ekonomi di sisi lainnya hanya bisa dilakukan dalam lingkungan makroekonomi yang stabil. Begitu pun pentingnya kestabilan makroekonomi ini menyebabkan kebijakan ekonomi lainnya cenderung diabaikan misalnya berkaitan dengan pembentukan bank sentral yang independen atau UU yang membatasi pemerintah dalam membiayai defisit dan sebagainya.

Institusi Asuransi Sosial

Walaupun institusi kestabilan makro ekonomi telah terbentuk, siklus bisnis tetap terjadi. Faktor eksogen seperti faktor musiman menyebabkan fluktuasi dalam siklus bisnis tetap akan terjadi, kemampuan pelaku ekonomi dalam melakukan penyesuaianpun berbeda-beda dan selalu akan menghasilkan *winner and loser*. Menjadi

sangat penting kemudian bagi pemerintah untuk mencapai dua hal yaitu perbaikan kesejahteraan masyarakat dan menjamin proses penyesuaian sendiri untuk menyediakan sistem asuransi sosial. Bagi kelompok yang belum mampu melakukan penyesuaian dalam masa transisi dalam sistem komunal seperti yang berlaku di Indonesia. Fungsi ini diambil alih oleh masyarakat atau keluarga, tetapi dengan makin kompleksnya masyarakat dan berkembangnya nilai-nilai individual maka kebutuhan lembaga ini makin penting. Pembentukan institusi sosial dalam kerangka mekanisme pasar berkaitan dengan kebutuhan akan stabilisasi sosial dan *social cohesion* sebagai bagian dari fondasi *social capital* yang dibutuhkan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara jangka panjang.

Institusi Manajemen Konflik

Bagi negara industri dimana nilai individualnya sangat tinggi, manajemen konflik dapat diatasi dengan lembaga hukum formal, tetapi bagi masyarakat komunal seperti Indonesia, hukum formal tidak cukup untuk mengatasi potensi konflik. Konflik sosial akan dapat merugikan karena dapat menyebabkan kegagalan dalam eksploitasi sumber daya ekonomi dan dapat menghambat kegiatan ekonomi karena ketidakpastian yang diciptakannya. Penciptaan institusi dapat dilakukan dengan pelbagai cara seperti penciptaan kekuasaan hukum, sistem representasi politik yang adil, institusionalisasi perlindungan terhadap kelompok minoritas merupakan salah satu contoh dari institusi ini.

Sumber: Dani Rodrik, *Institutions for High Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them*, *NBER Working Paper 7540*, 2000.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Mohamad Chatib, (2004), *Economic Update 2003: After Five Years of Reformasi Ekonomi, What Next?*, dalam M. Chatib Basri and Pierre van der Eng, *Business in Indonesia: New Challenges, Old Problems*, Singapore, ISEAS
- Beaugrand, Philippe, (2003), And Schumpeter Said, "This is How Thou Shalt Grow": The The Further Questions for Economic Growth in Poor Countries, *WP/04/40*, The International Moentery Fund.
- Bosworth, Barry P and Susan M Collins, (2003) , *The Empiric of Growth: An Update* *Brooking Papers on Economic Activity*, September 2003
- Field, Gary S. and Guy Pfeffermann (eds), *Pathway Out of Poverty: Private Firms and Economic Mobility in Developing Countries*, Boston, Mass, USA: Kluwer Academic Publisher.
- Galbraith, John K, (1957), *The New Industrial State*, Boston: Houghton Mifflin.
- Hahn, Chin Hee and Jong-Il Kim, (2003), *Understanding East Asian Growth: Determinants in a Cross-Country Perspectives*, *Korea Development Institute Working Paper No (?)*
- Ishihara, Yoichiro and Daan Marks, (2004), *Capacity Utilization in Indonesia, Time to Invest*, *Mimeo*
- Klein, Michael U and Bitu Hadjimichael, (2003), *The Private Sector in Development: Entrepreneurship, Regulation and Competitive Disciplines*, Washington D.C: the World Bank.
- Lee, Khai S, Guan Hua Lim and Soo Jiuan Tan, (2002), *Competing for the Markets: Growth Strategies for SMEs*, Singapore: Mc Graw Hill Inc.
- Maloney, William, (2002), *Informal Self Employment: Poverty Trap or Decent Alternative* in Field, Gary S. and Guy Pfeffermann (eds), *Pathway Out of Poverty: Private Firms and Economic Mobility in Developing Countries*, Boston, Mass, USA: Kluwer Academic Publisher.

Mukand, Sharun, and Dani Rodrik, (2002), In Search of the Holy Grail: Policy Convergence, Experimentation, and Economic Performance, Tufts University and Harvard University. Available via the internet: <http://ksghome.harvard.edu/~drodrik.academic.ksg/polconv.pdf>.

Rodrik, Dani, (2000), Institutions for High Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them, *NBER Working Paper 7540*

World Bank, (2004a), *Making Indonesia Competitive, Promoting Export, Managing Trade*, draft for discussion, June, 2004 —————, (2004b), *World Development Report 2005*, draft for discussion.